

**ANALISIS PERENCANAAN PENGEMBANGAN SEKTOR
UNGGULAN PADA SUB SEKTOR PERTANIAN
(JAGUNG KUNING) DALAM MENINGKATKAN
PERTUMBUHAN EKONOMI
KABUPATEN BANTAENG**



Diajukan oleh :

YOGIE BENI SUPARDI

45 04 011 003

**Mengetahui dan Mengesahkan
Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

**FAKULTAS EKONOMI JURUSAN ILMU EKONOMI
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**

2009

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERENCANAAN PENGEMBANGAN
SEKTOR UNGGULAN PADA SEKTOR PERTANIAN
DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN
EKONOMI KABUPATEN BANTAENG

NAMA MAHASISWA : YOGIE BENI SUPARDI

NOMOR STAMBUK : 45 04 011 003

JURUSAN : STUDI PEMBANGUNAN

FAKULTAS : EKONOMI

MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II



HAERUDDIN SALEH, SE., M.Si.



IRWAN L. GAFFAR, SE., M.Si

MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN:
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas "45" Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas "45"**

Ketua Jurusan Studi Pembangunan



HAERUDDIN SALEH, SE., M.Si.



IRWAN L. GAFFAR, SE., M.Si

Tanggal Pengesahan:.....

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari/Tanggal : **Kamis, 28 Mei 2009**

Skripsi atas Nama : **YOGIE BENI SUPARDI**

Stambuk/NIRM : **45 04 011 003**

Telah Diterima Oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas "45"
Makassar untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi pada Jurusan Studi Pembangunan.

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Pengawas Umum : Prof. DR. H. Abu Hamid
(Rektor Universitas "45")

Ketua : Haeruddin Saleh, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi)

Sekretaris : Faridah, SE., Ak., M.Si.

Anggota Penguji : 1. Haeruddin Saleh, SE., M.Si

2. Irwan L. Gaffar, SE., M.Si

3. Ramli Manrafi, SE., M.Si

4. Syamsuddin Jafar, SE.


.....


.....


.....


.....


.....


.....


.....

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Azza Wa Jalla atas berkah dan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Perencanaan Pengembangan Sektor Unggulan Pada Sub Sektor Pertanian (Jagung Kuning) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantaen”. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S-1) pada Fakultas Ekonomi Universitas “45” Makassar.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dalam hal teori, pembahasan dan teknik penulisan. Hal ini tidak lepas karena keterbatasan yang penulis miliki. Olehnya itu, saya dengan lapang dada menerima seluruh masukan dalam bentuk kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Selama pelaksanaan penelitian hingga penyusunan tugas akhir ini, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena sebagai bentuk apresiasi penulis yang mendalam, maka perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas “45” Makassar Bapak Prof. DR. H. Abu Hamid., M.A
2. Dekan Fakultas Ekonomi Bapak Haeruddin Saleh., S.E.,M.Si yang sekaligus sebagai pembimbing I yang tidak henti-hentinya memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi.

3. Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Bapak Irwan L. Gaffar., SE., M.Si yang sekaligus sebagai pembimbing II yang tidak henti-hentinya membimbing dan memotivasi penulis dari penulisan hingga penyusunan skripsi.
4. Segenap para Sifitas Akademika Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar yang tidak henti-hentinya melayani dan mengarahkan penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
5. Kepada Ayah dan Ibuku tercinta, sembah sujud ananda haturkan serta rasa terima kasih yang tak terhingga berkat bantuannya membesarkan penulis, mendidik dan membiayai hingga dapat menyelesaikan studi pada tingkat Sarjana Ekonomi (S-1).
6. Kepada Nenek dan Kakek serta para Paman dan Tante di Bantaeng dan juga Adik-adikku, penulis juga menghaturkan banyak terima kasih yang tak terhingga atas bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi (S-1).
7. Kepada para Sahabatku Andre, Madan, Memet, Udy, Mito, Andis, Andy, Rahmat, Dipo, Icha sastra, Andar UMM, Asri UIN say juga ucapkan banyak terima kasih karena selalu memberikan bantuan kepada penulis baik materi maupun bantuan lainnya.

Semoga apa yang penulis peroleh dalam hasil penelitian dalam bentuk skripsi dapat bermanfaat bagi diri peneliti sendiri dan bagi para peneliti lainnya serta bagi pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam mengambil keputusan

Makassar, 15 Mei 2009

Penulis;

YOGIE BENI SUPARDI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENERIMAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB. I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	4
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	4
BAB. II	
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Kerangka Teori.....	5
2.1.1. Pengertian Perencanaan Pembangunan Ekonomi.....	5
2.1.2. Pengertian Pembangunan Ekonomi.....	13
2.1.3. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	16
2.1.4. Pengertian Nilai Tambah Ekonomi.....	18
2.1.5. Pengertian Pendapatan.....	20
2.1.6. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	23
2.2. Kerangka Pikir.....	28
2.3. Hipotesis.....	29

BAB. III	METODE PENELITIAN	30
	3.1. Daerah Penelitian.....	30
	3.2. Cara Pengumpulan Data.....	30
	3.3. Jenis dan Sumber Data.....	31
	3.3.1. Jenis Data.....	31
	3.3.2. Sumber Data.....	31
	3.4. Metode Analisis.....	32
	3.5. Defenisi Operasional.....	33
BAB. IV	PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	35
	4.1. Perkembangan Produksi Komoditas Tanaman Pangan di Kabupaten Bantaeng.....	35
	4.2. Perkembangan Luas Lahan Tanaman Jagung Kuning di Kabupaten Bantaeng.....	38
	4.3. Perkembangan Volume Produksi Tanaman Jagung Kuning di Kabupaten Bantaeng.....	41
	4.4. Perkembangan Nilai Produksi Tanaman Jagung Kuning di Kabupaten Bantaeng.....	44
	4.5. Nilai Tambah (Value Added) Produksi Tanaman Jagung Kuningdi Kabupaten Bantaeng.....	46
	4.6. Analisis Location Quotion (LQ) Tanaman Jagung Kuning	48
	4.7. Perkembangan PDRB Kabupaten Bantaeng Atas Harga Konstan.....	50
	4.8. Analisis Kontribusi Tanaman Jagung Kuning Terhadap PDRB Kabupaten Bantaeng.....	54
BAB. V	KESIMPULAN DAN SARAN	57
	5.1. Kesimpulan.....	57
	5.2. S a r a n.....	58
	DAFTAR PUSTAKA.....	59
	Lampiran-lampiran.....	1/3

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. PERKEMBANGAN VOLUME PRODUKSI TANAMAN BAHAN MAKANAN KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2003-2007 (Ton)	36
Tabel 4.2. PERKEMBANGAN VOLUME PRODUKSI TANAMAN BAHAN MAKANAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2003-2007 (Ton).....	37
Tabel 4.3. PERKEMBANGAN LUAS LAHAN TANAMAN JAGUNG KUNING DI KABUPATEN BANTANG TAHUN 2003-2007.....	39
Tabel 4.4. PERKEMBANGAN VOLUME PRODUKSI TANAMAN JAGUNG KUNING DI KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2003-2007.....	42
Tabel 4.5. PERKEMBANGAN HARGA JAGUNG KUNING PER KILO GRAM DI KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2003 – 2007...	45
Tabel 4.6. PERKEMBANGAN NILAI TAMBAH TANAMAN JAGUNG KUNING DI KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2003-2007...	47
Tabel 4.7. HASIL ANALISIS LOCATION QUOTION (LQ) TANAMAN BAHAN MAKANAN KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2003-2009.	49
Tabel 4.7. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2003-2007.....	51

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap negara atau daerah mengupayakan proses pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara terus menerus sehingga negara atau daerah itu dapat menjadi daerah yang maju pembangunan ekonominya atau minimal dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dari setiap negara atau daerah, maka berbagai kebijakan ekonomi maupun non ekonomi perlu dikeluarkan dari instansi pemerintahan terkait dan didukung oleh masyarakat produsen, dan masyarakat konsumen sehingga dengan tujuan dikeluarkannya kebijakan itu dapat tercipta sinergitas antar sektor-sektor ekonomi dan sekaligus dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diharapkan oleh setiap negara/daerah.

Oleh karena itu, kebijakan non ekonomi yang dimaksud yaitu bagaimana pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah dan kemudian diteruskan ke pemerintahan provinsi dan selanjutnya ke pemerintahan daerah/kota dan tentunya dikeluarkannya kebijakan tersebut setiap pemerintahan daerah dituntut untuk mengelola sumber-sumber keuangan daerah. Selanjutnya kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang secara keseluruhan akan mempengaruhi berbagai aktivitas kegiatan sektor-sektor ekonomi.

Keterkaitan kebijakan ekonomi dan non ekonomi terhadap kemajuan pertumbuhan ekonomi secara garis besar sangatlah berpengaruh karena dengan kebijakan tersebut, dapat merubah perilaku pelaku ekonomi dan sekaligus pula dapat merubah sentimen pasar atau kondisi pasar sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan nasional (GNP) kalau dilihat dari aspek nasional dan nilai tambah produk atau produk domestik regional bruto (PDRB) kalau dilihat dari aspek regional/daerah.

Berdasarkan ulasan tersebut di atas, maka suatu daerah dikatakan mengalami kemajuan pertumbuhan ekonomi apabila pada daerah tersebut terjadi suatu pergeseran sektor ekonomi baik dilihat dari nilai produk maupun dilihat dari aspek tingkat penyerapan tenaga kerja dari berbagai sektor atau dalam artian apakah dari setiap sektor-sektor ekonomi yang terdapat pada PDRB memiliki pergeseran kontribusi nilai produksi atau penyerapan tenaga kerja terhadap PDRB tersebut. Kemudian disisi lain apakah dengan adanya pergeseran sektor tersebut adakah terdapat sektor basis yaitu sektor yang mempunyai kemampuan memberikan tingkat pendapatan kepada pemerintah dan kepada masyarakat suatu daerah.

Harapan setiap daerah tentunya terjadi suatu pergeseran sektor ekonomi pada daerahnya sebagaimana dijelaskan di atas, dan hal itu tentunya pula sama yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantang yang selalu berupaya agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih maju dan berkemabang dengan berdasar pada kemajuan pengembangan sektor-sektor unggulan dan sekaligus berupaya menciptakan sektor basis sehingga dengan upaya tersebut Kabupaten Bantang yang merupakan salah satu kabupaten yang menyusun rencana strategi (renstra), mencantumkan

pengembangan sektor pertanian sebagai salah satu sektor prioritas untuk dikembangkan sehingga dapat tercipta sektor-sektor unggulan lainnya sebagai akibat dari adanya sektor unggulan atau sector basis yang dikembangkan.

Salah satu sektor unggulan yang dikembangkan di Kabupaten Bantang sebagaimana rencana strategis yaitu pengembangan pembudidayaan tanaman jagung kuning. Pembudidayaan tanaman jagung kuning berdasarkan data dan informasi yang penulis dapatkan dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan bahwa pada tahun 2003 luas perkenunan tanaman ini yaitu 37.582 ha dan pada tahun 2007 menurun menjadi 39.145 ha. Untuk jumlah produksinya yaitu sebesar 205.384 ton pada tahun 2003 dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 297.525 ton. Sedangkan produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Bantaeng pada tahun 2003 bernilai sebesar Rp. 500.447,39 juta dan pada tahun 2007 bernilai sebesar Rp. 601.417,59 juta.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah apakah komoditi jagung di Kabupaten Bantaeng dapat dikategorikan sebagai komoditas unggulan sehingga mampu mendorong komoditas sektor lain yang tadinya bukan sector unggulan menjadi sector basis, serta dapatkah komoditi tersebut memberikan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB. Dan berdasarkan hal itulah, sehingga mendorong penulis untuk menganalisanya dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “Analisis Perencanaan Pengembangan Sektor Unggulan Pada Sub Sektor Pertanian (Jagung Kuning) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantaeng”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan data tabel tersebut di atas, maka rumusan masalah yang penulis akan kemukakan yaitu sebagai berikut :

- Seberapa besar peranan sub sektor unggulan pertanian tanaman perkebunan jagung kuning sebagai sektor basis di Kabupaten Bantang.
- Seberapa besar pula kontribusi sub sektor unggulan pertanian tanaman perkebunan jagung kuning sebagai sektor basis terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantaeng.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu sebagai berikut :

- Untuk Seberapa besar peranan sub sektor unggulan pertanian tanaman perkebunan jagung kuning sebagai sektor basis di Kabupaten Bantang.
- Seberapa besar pula kontribusi sub sektor unggulan pertanian tanaman perkebunan jagung kuning sebagai sektor basis terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantaeng.

1.3.2. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi instansi terkait pada khususnya dan masyarakat petani perkebunan jagung kuning pada umumnya di dalam mengambil kebijakan tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten bantaeng.

- b. Dapat sebagai bahan literatur bagi penulis lain, yang membahas tentang Perencanaan Pengembangan Sektor Unggulan Pada Sub Sektor Pertanian (Jagung Kuning) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantaeng”.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Pengertian Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Untuk menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi yang kondusif pada suatu negara atau daerah, maka setiap daerah biasanya harus menyusun suatu perencanaan yang baik dan berkesinambungan. Perencanaan itu bisa dalam bentuk perencanaan tata ruang atau wilayah, perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, perencanaan dalam penganggaran dan perencanaan-perencanaan lainnya.

Banyak para ahli ekonomi dalam memberikan pengertian dan konsep perencanaan sangatlah berbeda-beda akan tetapi dalam peraktek dan aplikasi perencanaan serta tujuan dari perencanaan itu sendiri pada hakekatnya adalah sama. Berdasarkan ungkapan tersebut di atas, maka pengertian perencanaan sebagaimana yang dijelaskan oleh Bintoro Tjokroamidjojo (2000 ; 12), mengatakan sebagai berikut :

“Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada setiap jenis usaha manusia”.

Pengertian lain perencanaan menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000 ; 12), mengatakan sebagai berikut :

“Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.”

Kalau dianalisa pengertian perencanaan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa di dalam melaksanakan suatu aktivitas tertentu maka seseorang harus mengetahui terlebih dahulu sasaran dan tujuan yang akan dicapai dari aktivitas kegiatan yang dilakukan. Oleh karena untuk mencapai sasaran dan tujuan itu maka harus disusun suatu perencanaan yang tepat serta dapat bersinambungan dari setiap aktivitas tersebut.

Pengertian lain perencanaan pembangunan dalam buku yang sama yang dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo (2000 ; 12), mengatakan sebagai berikut

“Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa. Oleh karena Albert Waterston menyebutkan perencanaan pembangunan adalah melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari berbagai kegiatan untuk mencapau tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan.”

Selanjutnya dalam buku yang sama pula pengertian perencanaan menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000 ; 12), mengatakan sebagai berikut :

”Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik serta lebih efisien dan efektif.”

Kata-kata tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berhubungan erat dengan perumusan kebijaksanaan (*policy formulation*). Oleh karena itu dalam buku *Planning for economic development* prof. Timbergen mengatakan bahwa dalam memberikan pengertian kebijaksanaan pembangunan (*development policy*) lebih luas dari pada perencanaan (*palns*). Usaha berencana yang dilakukan melalui peran pemerintah pada umumnya termasuk kategori yang pertama sedangkan yang kedua

berarti suatu program investasi terdiri dari proyek-proyek. Kemudian prof. Wijoyo mengemukakan bahwa salah satu kegiatan penting dalam suatu usaha pembangunan berencana adalah perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dari berbagai definisi-definisi tersebut memang dapat diketahui tentang perencanaan itu sendiri.

Secara sederhana, usaha pembangunan yang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi membutuhkan sebuah perencanaan yang akurat. Perencanaan ini dapat dilakukan oleh berbagai institusi yang berwenang atas tercapainya kesejahteraan yang merata di antara penduduk suatu negara/daerah. Namun pada umumnya, perencanaan dilkakukan oleh lembaga pemerintah mengingat seorang individu akan berusaha untuk memuaskan kebutuhan hidupnya tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkannya kepada individu lain. Untuk meredam benturan kepentingan antarindividu inilah lembaga pemerintahan yang ditunjuk menjadi lembaga yang melakukan perencanaan pembangunan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah yang dimaksud dengan perencanaan, sehingga untuk melakukannya dipilih institusi pemerintahan yang bersifat netral dalam menyelesaikan konflik kepentingan antarindividu. Pada hakekatnya perencanaan merupakan sebuah upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya, perubahan yang terjadi pada sebuah keseimbangan awal yang dapat menyebabkan perubahan pada sistem sosial yang kemudian akan membawahkan sistem yang ada menjauhi keseimbangan semula. Pengetian yang dimiliki sebuah proses perencanaan tidak terbatas pada definisi di atas, karena perencanaan sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan. Salah satu peran perencanaan

adalah sebagai arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai disamping sebagai tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilakukan.

Perencanaan mampu mengatasi ketidakseimbangan yang bersifat akumulatif. Ketidak seimbangan semacam ini dapat dicontohkan oleh konsep lingkaran setan yang acapkali diderita oleh sebaigian besar penduduk di dunia. Wujud nyata dari lingkaran setan ini adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat meningkatkan kesejahteraannya sebagai akibat ketidakmampuan generasi sebelumnya untuk lepas dari kemiskinan. Dengan kata lain, seorang individu A tidak dapat bekerja disebuah perusahaan dengan tingkat upah yang tinggi akibat rendahnya pendidikan yang dimilikinya. Namun setelah diuraikan lebih mendalam rendahnya pendidikan yang diterima oleh individu A ini ternyata disebabkan oleh ketidakmampuan orang tuanya untuk membiayai pendidikan si A sehingga si A harus bekerja pada usia yang relatif masih muda. Hubungan sebab-akibat antara suatu kondisi dengan kondisi yang lain inilah yang kemudian yang disebut sebagai lingkaran setan (*vicious circle*). Menurut Lincolin Arsyad (1999 ; 103) mengatakan

“Upaya unruk mengantisipasi lingkaran setan yang berkembang di masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, melakukan pembangunan dengan mencari modal dari luar negeri dan kedua, menghimpun tabungan wajib dari dalam negeri. Namun bagaimana usaha untuk merealisasikan dua jenis upaya tersebut merupakan tugas yang diemban oleh sebuah perencanaan pembangunan.”

Dari uraian di atas, maka menurut Tri Widodo (2006 ; 3) mengatakan sebagai berikut :

"Perencanaan kemudiaan dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh sebuah institusi public untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Artinya, dalam sebuah proses perencanaan, lembaga perencanaan wajib memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, keamanan, kondisi fisik, segi pembiayaan serta kualitas sumber daya yang ada di wilayah tersebut."

Definisi yang terpisah-pisah mengenai perencanaan memang sangat banyak, tetapi suatu teori umum mengenai perencanaan belum dijumpai dalam buku-buku atau dalam bentuk tertulis. Mengingat pokok isinya yang sedemikian evolusiner dan peka terhadap sejarah perkembangannya sendiri dan juga terhadap perkembangan-perkembangan lebih luas yang sedang terjadi dalam masyarakat sebagai keseluruhan

Ciri-ciri pokok dari perencanaan umum mencakup serangkaian tindakan beruntun yang ditujukan pada pemecahan persoalan-persoalan di masa jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Persoalan-persoalan perencanaan memang beraneka ragam, namun terlihat kegenderungan bahwa yang terutama adalah persoalan-persoalan ekonomi dan sosial; periode perencanaan, cakrawala waktu dari "masa datang", juga bermacam-macam sesuai dengan tipe dan tingkat perencanaan, namun demikian semua perencanaan mencakup suatu proses yang beruntun yang dapat diwujudkan sebagai konsep dalam sejumlah tahap, seperti :

- Identifikasi persoalan
- Perumusan tujuan-tujuan umum dan sasaran-sasaran yang lebih khusus dan yang dapat diukur, bertalian dengan persoalan yang bersangkutan
- Identifikasi pembatas-pembatas yang mungkin
- Proyeksi mengenai keadaan di masa datang

- Pencarian dan penilaian berbagai arah kegiatan alternatif
- Serta menyusun suatu rencana yang dipilih, di dalamnya dapat tercantum sesuatu perumusan kebijaksanaan atau strategi dan juga suatu rencana yang definitive.

Berdasarkan pada ciri-ciri dari pokok perencanaan tersebut, maka pengertian perencanaan menurut Paul Sitohang (2001 ; 3) mengatakan sebagai berikut :

“Perencanaan adalah terutama suatu cara berpikir mengenai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, perencanaan adalah terutama berorientasi kepada masa datang, sangat berkenaan dengan hubungan antara tujuan dan keputusan-keputusan kolektif dan mengusahakan kebijaksanaan dan program yang menyeluruh. Bilamana cara berpikir ini diterapkan, maka dapat dikatakan bahwa perencanaan sedang dilaksanakan”.

Di dalam kerangka perencanaan umum ini terdapat tipe-tipe perencanaan yang sangat beraneka- ragam. Perbedaan-perbedaan pokok tertentu antara berbagai macam tipe ini adalah sangat bermanfaat bagi analisa kita mengenai perencanaan regional. Perbedaan pertama dan barangkali juga yang paling hakiki dan selalu merupakan sumber kekaburan dalam perencanaan regional adalah antara perencanaan fisik dan perencanaan ekonomi. Perencanaan fisik (physical planning) adalah perencanaan struktur fisik sesuatu daerah (area) tata guna tanah, komunikasi, utilitas, dan sebagainya, dan berasal dari penataan dan pengendalian pengembangan kota. Dalam hal ini kemampuan perencanaan fisik adalah lebih unggul daripada mekanisme pasar. Perencanaan ekonomi (economic planning) lebih berkenaan dengan struktur ekonomi sesuatu daerah dan tingkat kemakmurannya secara keseluruhan. Perencanaan ekonomi lebih bertumpu pada mekanisme pasar daripada perencanaan fisik yang sangat

bertumpu pada pengendalian yang bersifat langsung. Sangat disayangkan, bahwa banyak orang yang memandang pembagian antara perencanaan fisik dan ekonomi ini sebagai hal yang bersifat mutlak, suatu salah pengertian yang disebabkan karena perencanaan fisik adalah suatu sarana yang penting dalam pelaksanaan rencana dan demikian juga kebalikannya.

Perbedaan kedua adalah antara perencanaan alokatip dan inovatip. Istilah-istilah ini adalah nama yang diberikan kepada dua model instrumental dari perenganaan yang dibagi menurut fungsi atau daerah kepentingan dari perencanaan yang dibagi menurut fungsi atau daerah kepentingan (area of concern). Perenganaan alokatip (allocative planning) adalah berkenaan dengan kordinasi penyelarasan hal-hal yang bertentangan, agar dapat terjamin bahwa sistem yang bersangkutan tercakup secara efisien sepanjang waktu sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditempuh. Itulah sebabnya perencanaan ini kadang-kadang dinamakan perencanaan yang bersifat mengatur (regulatory planning). Pada tingkat perusahaan kecil hal ini berarti perencanaan mengenai penyerahan input bahan-bahan baku dan tenaga kerja dan distribusi barang-barang akhir. Pada tingkat perekonomian nasional, hal ini berarti pengaturan perekonomian secara bulanan dengan menrrunakan kebijaksanaan fiskal dan moneter. Pada pihak lain, perencanaan inovatip (inovalitive planning) tidaklah semata-mata berkenaan dengan perencanaan yang bertujuan agar sistem yang bersangkutan dapat berfungsi secara effisien, tetap lebih berkenaan dengan perbaikan / pengembangan sistem yang bersangkutan sebagai keseluruhan, dengan menunjukkan sasaran-sasaran baru dan berusaha menimbulkan perubahan-perubahan besar. Itulah

sebabnya perencanaan ini kadang-kadang dinamakan (development planning). Berkenan dengan contoh perusahaan kecil tersebut diatas, pemasaran suatu produk baru atau pembukaan atau suatu pabrik tambahan dalam suatu jangka waktu tertentu, adalah termasuk perencanaan inovatif.

2.1.2. Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pembangunan dapat diartikan berbeda-beda oleh etiap orang tergantung dari sudut pandang apa yang digunakan oleh orang tersebut. Perbedaan cara pandang mengenai proses pembangunan yang dilakukan akan menyulitkan kepada kita tetang seberapa maju proses pembangunan yang dilakukan di sebuah negara atau daerah. Untuk mengatasi kerancuan definisi tersebut, maka pada pembahasan ini, akan menjelaskan mengenai definisi pembangunan yang umum digunakan. Untuk menjelaskan definisi tyersebut, pengertian pemangunan dapat dijelaskan dengan menggunakan dua pandangan yang berbeda.

Menurut Tri Widodo (2006 ; 3), mengatakan pembangunan ekonomi yang dipandang dari pendekatan pembngunan tradisional yaitu :

“Pembangunan ekonomi yaitu sebagai berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) ditingkat nasional atau produk domestic regional bruto (PDRB) di tingkat daerah”.

Pembangunan indikator PDB ini terkait dengan kemampuan indikator ini dalam mencerminkan tingkat kemakmuran bangsa. Dengan kata lain, indikator ini memungkinkan kita mengetahui tingkat output yang diproduksi disebuah negara untuk dikonsumsi oleh penduduknya atau digunakan untuk melakukan investasi. Selain penggunaan indikator PDB sebagai tolok ukur pertumbuhan di suatu negara, beberapa

ahli ekonomi pembangunan lain menggunakan indikator produksi dan penyerapan tenaga kerja di negara tersebut.

Dengan adanya pembangunan ekonomi maka output atau kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah. Disamping itu kebahagiaan penduduk akan bertambah pula karena pembangunan ekonomi tersebut menambah kesempatan untuk mengadakan pilihan yang lebih luas. Kiranya sukar untuk menghubungkan antara kekayaan dengan kebahagiaan. Kesejahteraan tergantung pada bagaimana pandangan seseorang terhadap kehidupan manusia. Orang yang kaya belum tentu lebih sejahtera dibandingkan dengan orang miskin. Seseorang belum tentu merasa lebih sejahtera kalau penghasilannya bertambah. Kekayaan akan menambah kebahagiaan kalau kekayaan itu menambah alat-alat pemuas kebutuhan.

Dalam teori-teori pembangunan ekonomi banyak para ahli ekonomi seperti Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan para ekonomi lainnya pada zaman abad ke 18 dan permulaan abad 19 telah menghasilkan suatu konsep teori pembangunan ekonomi. Para ahli ekonomi pada abad tersebut di atas dikenal dengan aliran klasik dan di mana konsep dasar pembangunan ekonominya mengatakan (Irawan, M. Suparmoko, 1992 ; 15), yaitu sebagai berikut :

“Kemajuan teknologi mula-mula disebabkan oleh adanya akumulasi kapital atau dengan kata lain kemajuan teknologi tergantung pada pembentukan kapital. Dengan adanya akumulasi kapital akan memungkinkan dilaksanakannya spesialisasi sehingga produktivitas tenaga kerja dapat bertambah. Kecepatan pembentukan kapital tergantung pada tinggih rendahnya tingkat keuntungan. Sedangkan tingkat keuntungan akan menurun setelah berlakunya hukum tambahan hasil yang semakin berkurang (*law of diminishing returns*)”.

Berdasarkan pada penjabaran dasar teori pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh para aliran klasik tersebut di atas, maka pengertian pembangunan ekonomi menurut Irawan dan M. Suparmoko (1992 ; 5) menjelaskan yaitu sebagai berikut :

“Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali di ukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita”.

Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping meningkatkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat output pada suatu saat tertentu ditentukan oleh tersedianya atau digunakannya baik sumberdaya alam maupun sumber daya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar dan kerangka kehidupan ekonomi serta sikap dari output itu sendiri.

Berdasarkan pada ulasan tersebut di atas, maka pengertian pembangunan ekonomi menurut Lingcolin Arsyad (1999 ; 70) mengatakan sebagai berikut :

“Pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para wiraswasta. Inovasi disini berartiperbaikan teknologi dalam arti luar, misalnya penemuan produk baru, pembukaan pasar baru dan sebagainya. Inovasi tersebut menyangkut perbaikan kuantitatif dari sistem ekonomi itu sendiri yang bersumber dari kreativitas para wiraswasta”.

Pembangunan ekonomi berawal pada suatu lingkungan sosial, politik dan teknologi yang menunjang kreativitas para wiraswasta. Adanya lingkungan yang menunjang kreativitas akan menimbulkan beberapa wiraswasta perintis yang mencoba menerapkan ide-ide baru dalam kehidupan ekonomi, sehingga pada akhirnya akan mendorong kemandirian dalam berusaha tanpa harus bergantung pada utang luar negeri.

2.1.3. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Semenjak berakhirnya Perang Dunia Kedua, perkembangan teori pembangunan ekonomi menjadi sangat cepat. Hal ini ditandai dengan hadirnya beberapa model teori. Perkembangan teori ini didominasi oleh empat aliran pembangunan ekonomi, yaitu (1) teori tahapan linear, (2) model perubahan structural, (3) revolusi ketergantungan internasional dan (4) kontrarevolusi pasar bebas neoklasik.

Di dalam teori tahapan linear, terdapat dua teori dasar. Di mana menurut Tri Widodo (2006 ; 5) mengatakan sebagai berikut :

“Teori pertama adalah teori tahapan pertumbuhan, di mana dalam setiap pembangunan yang dilakukan, sebuah negara haruslah melewati beberapa tahapan tertentu. Tahapan yang harus dilewati oleh setiap negara adalah sama. Menurut teori ini, negara-negara maju telah mencapai tahapan tinggal landas. Untuk mencapai tahapan ini, sebuah negara harus mampu untuk mengerahkan dana tabungan yang dimiliki oleh negara tersebut guna menciptakan dasar investasi yang memadai untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi”.

Sedikit banyak terdapat kaitan dengan usaha untuk mencapai tahapan tinggal landas, teori kedua merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memobilisasi dana tabungan disebuah negara. Oleh karena itu, dalam buku yang sama menurut Tri Widodo (2006 ; 5), mengatakan sebagai berikut :

“Dalam proses pertumbuhan ekonomi setiap perekonomian harus memiliki tabungan yang dapat diinvestasikan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan PDB-nya. Semakin banyak yang dapat ditabung dan diinvestasikan, maka laju pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat. Perlu pula diingat, bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang cepat juga tergantung pada tingkat produktivitas investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi”.

Kalau dianalisa dari kedua pengertian tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pada suatu negara, maka faktor penentunya terdapat pada aspek adanya dana tabungan yang dimiliki suatu negara, serta adanya kemajuan investasi pada sektor produktif pada negara yang menginginkan pertumbuhan ekonomi negaranya. Hal ini sangat penting karena dalam perekonomian apapun bentuknya peranan modal apakah itu bersumber dari pinjaman luar negeri ataupun tabungan dalam negeri memegang andil besar di dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan pada ulasan tersebut di atas, maka pengertian pertumbuhan ekonomi menurut Schumpeter (Lincolin Arsyad 1999 ; 70), mengatakan sebagai berikut :

“Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan “teknologi”. Produksi itu sendiri misalnya kenaikan output yang disebabkan oleh pertumbuhan stok modal tanpa perubahan teknologi produksi yang lama”.

Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan bagi pembangunan ekonomi di suatu negara. Kemiskinan yang berlangsung terus, dibanyak negara-negara dunia ketiga merupakan salah satu contoh dari akibat tidak adanya pertumbuhan ekonomi di negara tersebut (stagnasi). Oleh karena itu untuk mengetahui ada tidaknya suatu pertumbuhan ekonomi pada suatu negara, menurut Tulus T. H. Tambunan (2001 ; 57), mengatakan sebagai berikut :

“Untuk mengetahui ada tidaknya pertumbuhan ekonomi pada suatu negara dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek permintaan aggregate (*aggregate demand*) dan dari sisi penawaran agregat (*aggregate supply*) dan dari kedua aspek ini akan menciptakan output aggregate yang dihasilkan dari di dalam suatu perekonomian yang biasanya disebut produk domestik bruto (PDB) yang selanjutnya akan menciptakan pendapatan nasional”.

Lain halnya pandangan Subandi (2005 ; 25) tentang pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut :

“Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dinilai dengan berbagai ukuran agregat. Secara umum, pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui sebuah besaran dengan istilah pendapatan nasional. Meskipun bukan merupakan satu-satunya ukuran untuk menilai pertumbuhan ekonomi output suatu bangsa, dan ini sangat representatif dan sangat lazim digunakan”.

Pendapatan nasional bukan hanya berguna untuk menilai perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu, tetapi juga membandingkan dengan negara lain. Di samping itu, dari pendapatan nasional selanjutnya dapat pula diperoleh turunannya (*derived measures*) seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita. Sedangkan pendapatan perkapita itu sendiri merupakan salah satu indikator untuk melihat apakah suatu negara atau daerah mengalami tingkat kesejahteraan yang diperoleh dari berapa besar produk nasional bruto (PNB) atau gross national product (GNP) kalau dilihat dari aspek nasional/negara akan tetapi kalau dilihat dari aspek wilayah regional maka yang dinilai yaitu PDRB kemudian dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama.

2.1.4. Pengertian Nilai Tambah Ekonomi

Perhitungan Produk Nasional Bruto (PNB) yang didasarkan pada pendekatan produksi memerlukan data tentang nilai tambah setiap produksi yang dihasilkan dalam

suatu negara atau daerah. PNB diperoleh dengan mengalikan setiap produksi yang dihasilkan dengan nilai tambahnya.

Berdasarkan pada penjelasan dasar tentang perhitungan nilai tambah dengan menggunakan pendekatan produksi, maka pengertian nilai tambah Menurut Dumairy (1997 ; 39) mengatakan sebagai berikut :

“Nilai tambah (added value) adalah selisih antara nilai akhir (harga jual) suatu produk dengan nilai bahan bakunya. Nilai tambah sektoral suatu produk mencerminkan nilai tambah produk tersebut disektor bersangkutan. Nilai tambah yang dihitung menurut harga tahun yang berjalan disebut nilai tambah menurut harga berlaku serta nilai tambah juga dapat dihitung berdasarkan harga konstan berdasarkan tahun tertentu”.

Untuk menghitung nilai tambah menurut harga konstan terdapat empat macam cara yaitu :

1. Metode deflasi ganda
2. Metode ekstrapolasi langsung
3. Metode deflasi langsung dan
4. Metode deflasi komponen pendapatan.

Tiga yang pertama diterapkan dalam perhitungan PDB menurut pendekatan produksi, sedangkan yang terakhir digunakan dalam perhitungan produk domestik bruto (PDB) menurut pendekatan pendapatan.

Metode deflasi ganda dalam menghitung nilai tambah dilakukan jika keluaran (*output*) menurut harga konstan dihitung terpisah dari masukan-antara (*intermediate-input*) menurut harga konstan. Dalam hal ini, nilai tambah menurut harga konstan adalah selisih antara keluaran dan masukan-antara menurut harga konstan. Untuk menghitung

keluaran dan masukan-antara menurut harga konstannya itu sendiri, dapat digunakan salah satu atau kombinasi dari tiga metode penghitungan pertumbuhan riil sebagaimana baru saja dijelaskan di atas, (revaluasi, ekstrapolasi, atau deflasi). Cara ekstrapolasi langsung dilakukan dengan menggunakan perkiraan-perkiraan dari perhitungan keluaran menurut harga konstan, atau langsung menggunakan indeks produksi yang sesuai. Metode ini bertolak dari asumsi bahwa keluaran menurut harga konstan berubah sejalan dengan masukan menurut harga konstan, dengan perkataan lain nisbah masukan-antara (intermediate-input ratio) riil dianggap tetap.

Metode deflasi langsung dilakukan dengan menggunakan indeks harga implisit dari keluaran atau secara langsung menggunakan indeks harga produksi yang sesuai, kemudian dijadikan angka pembagi terhadap nilai tambah menurut harga yang berlaku. Secara tersirat metode ini berasumsi bahwa inflasi yang terjadi pada keluaran sama dengan inflasi masukan-antar. Metode deflasi komponen pendapatan dilakukan dengan cara mendeflasikan komponen-komponen nilai tambah atas pendapatan-pendapatan yang membentuk unsure nilai tambah tersebut, yakni pendapatan tenaga kerja, modal dan manajemen. Metode ini hanya cocok bila komponen nilai tambah terutama terdiri dari kompensasi tenaga kerja dan penyusutan, dan biasanya diterapkan untuk sektor-sektor tertentu di mana ketiga metode sebelumnya sukar diterapkan.

2.1.5. Pengertian Pendapatan

Setiap manusia yang bekerja baik itu sebagai tenaga buruh harian, pegawai negeri sipil, para pengusaha, para praktisi dan lain-lain sebagainya secara rasional memerlukan uang yang bersumber dari pendapatan yang dihasilkan sebagai balas

jasa dari jerih payah sebagai pekerja. Berdasarkan hal tersebut maka dapat kita mengatakan bahwa sesungguhnya pengertian pendapatan secara umum merupakan balas jasa dari hasil pekerjaan.

Pengertian ini pula masih belum lengkap, karena banyak pakar di bidang ekonomi memberikan pengertian pendapatan yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya tentang pengertian pendapatan, maka Menurut Winardi Dalam Kamus Ekonomi (1998 ; 245), mengatakan sebagai berikut :

“Income seperti dipergunakan dalam ilmu ekonomi teoretika, adalah hasil berupa uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia bebas. Bila digunakan dalam bidang pembukuan maka pengertian pendapatan luas yaitu pada umumnya pendapatan sebuah perusahaan atau individu.”

Kalau disimak pengertian pendapatan menurut winardi tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa sesungguhnya pendapatan itu berupa hasil yang diperoleh seseorang sebagai akibat dari balas jasa pekerjaan atau karena adanya balas jasa dari penyewaan barang-barang modal sehingga seseorang itu memperoleh pendapatan. Akan tetapi lain halnya pengertian pendapatan yang dikemukakan oleh Paul A. Samuelson (Sudarman Ari 2001 ; 214) mengatakan :

“Pendapatan merupakan total uang yang diperoleh atau yang terkumpul dalam suatu periode tertentu dan perlu dibedakan dalam kekayaan. Dimana kekayaan diartikan sebagai persediaan *netto aktiva* harta nyata dan harta keuangan milik seseorang atau suatu keluarga pada suatu saat tertentu”

Pengertian pendapatan yang dikemukakan oleh pakar ekonomi moderen ini, sebenarnya terdiri dari dua aspek pengertian pendapatan. Aspek pertama pendapatan

dilihat dari aspek rumah tangga konsumen dan pendapatan yang dilihat dari rumah tangga produsen. Akan tetapi pada dasarnya mempunyai arah yang sama.

Pada perinsipnya pendapatan tersebut dapat pula dibedakan dalam beberapa pengertian yaitu pendapatan nasional, pendapatan perkapita dan pendapatan disposable.

Pendapatan nasional menurut Lincoln Arsyad (1999 ; 16), mengatakan :

“Pendapatan nasional adalah merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian (negara) dalam jangka waktu satu taun. Serta di dalam perhitungannya menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendapatan dan pendekatan pengeluaran.”

Dalam pengertian ini, analisa pendapatan nasional dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi. Pendekatan produksi ini dilakukan dengan jalan penjumlahan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan setiap sektor produktif dalam suatu negara dalam satu periode tertentu. Jumlah nilai produksi ini disebut *gross domestic product*. Pendekatan lainnya yaitu pendekatan pendapatan itu sendiri dan yang ke tiga yaitu pendekatan pengeluaran di mana pendekatan ini dilakukan dengan jalan menjumlahkan seluruh pengeluaran dari lapisan masyarakat. Pendapatan yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat akan dibelanjakan atau di konsumsikan pada berbagai barang dan jasa.

Suatu perekonomian dikatakan maju apa bila tingkat kegiatannya lebih tinggi dari pada apa yang dicapai masa sebelumnya. Dengan kata lain perkembangannya baru tercipta apabila jumlah fisik barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah besar pada tahun berikutnya. Perubahan nilai pendapatan nasional dari tahun ke tahun juga berubah disebabkan oleh

kenaikan harga dan untuk mengetahui apakah perekonomian suatu negara mengalami perkembangan, perlu ditentukan perubahan sebelumnya yang berlaku dalam kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun. Oleh karena itu pengaruh perubahan harga terhadap nilai pendapatan nasional harus dihapuskan. Sehingga dengan demikian pendapatan nasional yang dihitung menurut harga konstan, tetapi bukan atas harga yang berlaku.

Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan selain untuk membedakan antara negara – negara maju dan negara-negara sedang berkembang. Dengan kata lain, pendapatan perkapita selain bisa memberikan gambaran tentang perkembangan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara, juga dapat menggambarkan perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi diantara berbagai negara. Para ahli ekonomi pada umumnya menggunakan pendapatan perkapita sebagai indikator kesejahteraan.

Pendapatan perkapita dapat di artikan sebagai pendapatan rata-rata penduduk yang diperoleh dalam satu tahun tertentu sedangkan pendapatan *disposable income* (pendapatan siap dibelanjakan), merupakan suatu pendapatan yang siap dibelanjakan setelah dikurangi oleh pajak. Pada umumnya tinggi rendahnya pendapatan tergantung pada tinggi rendahnya produksi barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap negara atau daerah yang kemudian dikalikan dengan harga pasarnya.

2.1.6. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada dasarnya pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pengertian GNP dan PDB adalah sama, Cuma yang membedakan terletak pada apakah yang akan dianalisa itu skopnya negara atau suatu daerah. Kalau di dalam menganalisa

berapa besar pertumbuhan ekonomi suatu negara maka indikatornya adalah *Gross National Product* (GNP) atau *Product domestic Broto*, akan tetapi apabila suatu daerah tertentu atau wilayah tertentu misalnya suatu propinsi atau daerah maka indikatornya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Oleh karena itu, ketergantungan atau keterkaitan antara pendapatan nasional (PN) dan komponen-komponen penentunya, yaitu konsumsi (C), tabungan atau saving (S) dan investasi (I). Adapun arti dari C, S, dan I bila dikaitkan dengan pendapatan nasional maka menurut Asfia Murni (2006 ; 51), menjelaskan :

“Konsumsi (C), dapat diartikan sebagai bagian dari pendapatan nasional (PN) yang dikeluarkan untuk membeli barang-barang konsumsi, Saving (S), bagian dari pendapatan yang ditunda pengeluarannya atau dapat juga dikatakan konsumsi masa yang akan datang dan Investasi (I), dapat diartikan sebagai pengeluaran masyarakat (RTP) untuk pembelian barang-barang modal.”

Perekonomian suatu negara di dasarkan pada nilai pendapatan nasionalnya (*National Income/NI*). Biasanya pendapatan nasional tersebut diukur dengan nilai produksi domestik bruto (PDB). Sedangkan untuk mengetahui gambaran tingkat kesejahteraan suatu masyarakat atau negara didasarkan pada produk nasional bruto (PNB). Produk domestic broto (PDB) yang dihitung pada areal tertentu seperti propinsi disebut produk domestik regional bruto (PDRB).

Sebelum pembahasan lebih lanjut, ditinjau terlebih dahulu pengertian Produk Domestik Bruto (PDB) tersebut. Dalam buku pengantar ekonomi karangan Paul A.Samuelson, yang disadur oleh (A. Jaka Wasana 1999 ; 134) mengatakan sebagai berikut:

“Produk Domestik Bruto adalah angka yang kita peroleh bila kita menjumlahkan seluruh nilai beras, computer, jeruk, jasa potong rambut, pesawat tempur dan berbagai mesin yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dengan memanfaatkan tanah, tenaga kerja, modal dan ilmu pengetahuannya. Jumlah tersebut akan sama dengan jumlah nilai seluruh pengeluaran untuk barang konsumsi, barang industri dan kebutuhan pemerintah”.

Bila dirumuskan berdasarkan pada pengertian itu maka PDB adalah $C + I + G$ di mana C adalah nilai konsumsi yang dikeluarkan oleh masyarakat pada saat tertentu (satu tahun) dalam suatu daerah atau negara, I adalah investasi yang dikeluarkan oleh masyarakat tersebut untuk meningkatkan kegiatan ekonominya sedangkan G adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu dan tempat tertentu pula.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut, pada dasarnya pengertian tentang pendapatan nasional, dan pengertian PDRB juga sama sebagai mana yang dijelaskan oleh Winardi (1997 ; 117), mengatakan :

“Pendapatan nasional diperlukan untuk mengetahui perkembangan ekonomi dan gambaran umum kesejahteraan dalam masyarakat suatu negara. Perkembangan diketahui dengan menghitung tingkat pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto), sedangkan gambaran umum kesejahteraan masyarakat diketahui dengan melalui PNB (Produk Nasional Bruto) suatu negara”.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka apabila diaplikasikan pada pembangunan ekonomi suatu daerah/propinsi tertentu maka acuannya adalah pengembangan PDRB. Sedangkan di dalam PDRB itu sendiri terdapat beberapa sektor-sektor ekonomi antara lain sektor pertanian, industri dan sektor jasa. Serta dari ketiga

sektor ekonomi tersebut di atas, terbagi pula pada beberapa sub sektor. Untuk lebih jelasnya perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Sektor pertanian terdiri dari :

- Pertanian tanaman bahan makanan
- Perkebunan
- Peternakan
- Kehutanan
- Perikanan
- Pertambangan

2. Sektor industri terdiri dari :

- Industri besar
- Industri Sedang/menengah
- Industri kecil dan kerajinan rakyat

3. Sektor jasa terdiri dari :

- Jasa listrik gas dan air
- Jasa bangunan
- Jasa perdagangan restoran dan hotel
- Jasa angkutan dan komunikasi
- Jasa bank dan lembaga keuangan lain
- Jasa sewa rumah
- Jasa pelayanan pemerintah

- Dan jasa-jasa lainnya.

Berdasarkan perincian sektor-sektor dan sub sektor ekonomi tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa dalam produk domestik regional bruto (PDRB) terdapat 3 sektor dasar yaitu pertanian, industri dan jasa serta terdiri dari 17 sub sektor. Hal ini pula telah diperkecil dari 17 sub sektor menjadi 9 sub sektor, adapun alasan diperkecilnya sub sektor tersebut di atas menurut beberapa pakar ekonomi yaitu untuk mempermudah di dalam menganalisa perkembangan PDRB dari tahun ke tahun.

Adapun jumlah sub sektor yang telah diperkecil, perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Pertanian
2. Industri
3. Listrik, Gas dan Air
4. Bangunan
5. Perdagangan, restoran dan hotel
6. Angkutan dan komunikasi
7. Bank dan lembaga keuangan
8. Pemerintah
9. Jasa-jasa lainnya.

2.2. Kerangka Pikir

DASAR PEMIKIRAN SUATU PENELITIAN



2.3. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan kerangka pikir, maka hipotesis yang penulis angkat yaitu :

- Diduga sub sektor perkebunan tanaman jagung kuning sebagai sub sektor basis di Kabupaten Bantaeng.
- Diduga pula kontribusi sub sektor unggulan pertanian tanaman perkebunan jagung kuning sebagai sektor basis terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantaeng relatif besar dari tahun 2003 hingga tahun 2007.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Daerah Penelitian

Kabupaten Bantang, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang mengembangkan perkebunan tanaman jagung kuning. Alasan dipilihnya kabupaten ini karena tanaman jagung kuning merupakan komoditi unggulan yang dikembangkan dan masuk sebagai salah satu prioritas dalam renstra Kabupaten Bulukumba.

Oleh karena itu dalam pengemabilan data di Kabupaten Bantang penulis membutuhkan waktu selama 2 bula atau 60 hari atau dari Bulan Februari 2008 hingga Maret tahun 2007.

3.2. Cara pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. **Observasi** (pengamatan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan meninjau secara langsung wilayah-wilayah yang produktif di dalam menghasilkan sektor pertanian khususnya tanaman perkebunan jagung kuning di Kabupaten Bantang dan melakukan wawancara langsung dengan responden (kepala dinas pertanian dan tanaman pangan, serta dengan beberapa instansi terkait) melalui pengisian daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh penulis

- b. **Dokumentasi** yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan dokumen-dokumen dan bahan bacaan yang diperoleh dari literature-literatur yang mempunyai hubungan dengan pokok pembahasan penelitian ini.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan jenis data yaitu sebagai berikut :

a. **Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh dengan melalui wawancara secara langsung dengan para responden yang dalam hal ini, para karyawan dan karyawan Kantor Dinas Pertanian dan tanaman pangan serta juga dengan para petani perkebunan jagung kuning serta instansi terkait lainnya yang bertugas dalam pengambilan data atau survei sebagai sampel untuk mendapatkan data yang akurat dengan melalui wawancara langsung dengan membuat angket atau quesuener pertanyaan.

b. **Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk laporan tertulis dari kantor atau instansi terkait yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian yang dalam hal ini yaitu keadaan jumlah petani jagung kuning, perkembangan PDRB atas dasar harga konstan dan lain-lain yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini.

3.3.2. Sumber Data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan bersumber dari :

- Kantor Biro Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

- Kantor Biro Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng
- Kantor Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Bantaeng
- Dari para petani perkebunan jagung kuning di Kabupaten Bantaeng

3.4. Metode Analisis

Data yang telah dikumpulkan, akan dianalisa dengan menggunakan 2 alat analisis yaitu sebagai berikut :

a. Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah pada suatu daerah yang diamati terdapat sektor basis. Adapun alat analisis atau rumus yang dimaksud Lincolin Arsyad (1999 ; 316) sebagai berikut :

$$LQ = \frac{\frac{V_{ik}}{V_k}}{\frac{V_{ip}}{V_p}}$$

Dimana :

V_{ik} = Jumlah produksi jagung kuning di Kabupaten Bantaeng pada tahun tertentu (Ton)

V_k = Jumlah seluruh Produk sektor pertanian di Kabupaten Bantaeng (Ton) pada tahun tertentu

V_{ip} = Jumlah produksi jagung kuning di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun tertentu (Ton)

V_p = Jumlah seluruh produksi sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun tertentu (Ton)

b. Analisis Kontribusi

Tujuan digunakan alat analisis ini yaitu untuk mengetahui berapa besar kontribusi sub sektor tanaman perkebunan (jagung kuning) terhadap PDRB Kabupaten Bantaeng dengan formulasi rumus yaitu :

$$S_j = \frac{Y_j}{Y} \times 100 \%$$

Dimana :

S_j = Nilai kontribusi sub sektor tanaman perkebunan jagung kuning terhadap PDRB di Kabupaten Bantaeng (Rp)

Y_j = Nilai produk sub sektor tanaman perkebunan jagung kuning (Rp)

Y = Jumlah seluruh nilai PDRB Kabupaten Bantang (Rp)

3.5. Defenisi Operasional

Variabel-variabel pokok yang digunakan untuk mendukung dan memberikan arah yang jelas dalam pembahasan skripsi ini yaitu :

1. V_{ik} = Jumlah produksi jagung kuning di Kabupaten Bantaeng dimana nilai ini akan dijadikan sebagai nilai dasar atau basis di Kabupaten Bantaeng yang dinilai dengan (ton).
2. V_k = Jumlah seluruh Produk sektor pertanian di Kabupaten Bantaeng pada tahun tertentu sebagai pembanding yang dinilai dengan (ton)

3. V_{ip} = Jumlah produksi jagung kuning di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun tertentu di Provinsi Sulawesi Selatan yang dianggap sebagai produk pembandingan dalam menganalisis sektor basis di Kabupaten Bantaeng (ton)
4. V_p = Jumlah seluruh produksi sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun tertentu yang juga sebagai data pembandingan bagi seluruh produksi sektor pertanian Kabupaten Bantaeng yang dinilai dengan (ton).
5. S_j = Nilai kontribusi sub sektor tanaman perkebunan jagung kuning terhadap PDRB di Kabupaten Bantaeng yang dalam artian besar kecilnya nilai S_j ditentukan oleh nilai pembandingan Y yang satuannya (Rp)
6. Y_j = Nilai produk sub sektor tanaman perkebunan jagung kuning yang dianggap sebagai sektor unggulan di Kabupaten Bantang yang nilainya dianggap sebagai terbanding yang satuannya (Rp)
7. Y = Jumlah seluruh nilai PDRB Kabupaten Bantang yang dianggap sebagai nilai pembandingan yang satuannya (Rp)

BAB. IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Perkembangan Produksi Komoditas Tanaman Pangan di Kabupaten Bantaeng

Setiap daerah selalu berusaha memaksimalkan penyediaan pangan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Oleh karena itu, agar ketersediaan pangan dapat terpenuhi maka salah satu yang harus dilakukan daerah yaitu pemanfaatan sumberdaya alam yang dimilikinya.

Sumberdaya alam yang dimiliki Kabupaten Bantaeng yang hubungannya dengan penyediaan pangan yaitu kesuburan lahan pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Berdasarkan keunggulan absolut tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bantaeng berupaya agar sektor pertanian selalu yang menjadi prioritas utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang telah diatur dalam rencana strategis (RENSTRA) Kabupaten Bantaeng.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, maka berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten ini yang salah satunya yaitu kebijakan dalam rangka memenuhi swasembada pangan yang mana tujuannya untuk perkuatan pertumbuhan ekonomi sebagai basis sektor pertanian guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat tani di Kabupaten Bantaeng.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dan berdasarkan Surat keputusan Bupati Bantaeng, maka hal itu terbukti dan dapat dilihat pada jumlah produksi komoditas tanaman bahan makanan yang dapat dilihat pada tabel berikut yaitu :

Tabel 4.1. PERKEMBANGAN VOLUME PRODUKSI TANAMAN BAHAN MAKANAN KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2003-2007 (Ton)

No	Jenis Tanaman	Tahun				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	Padi (Ton)	71.578	76.899	76.906	68.685	72.275
	Perkembangan (%)	-	7.43	0.01	-10.69	5.23
2	Jagung Kuning (Ton)	205.384	208.510	220.260	186.561	297.525
	Perkembangan (%)	-	1.52	5.64	-15.30	51.36
3	Ubi Kayu (Ton)	4.930	5.038	3.939	3.544	3.665
	Perkembangan (%)	-	2.19	-21.81	-10.03	3.41
4	Ubi Jalar (Ton)	763	749	764	1.098	1.152
	Perkembangan (%)	-	-1.83	2.00	-99.86	4.92
5	Kacang Tanah (Ton)	713	1.513	1.536	1.941	2.093
	Perkembangan (%)	-	112.20	1.52	26.37	7.83
6	Kacang Kedele (Ton)	750	777	337	824	875
	Perkembangan (%)	-	3.60	-56.63	144.51	6.19
7	Kacang Hijau (Ton)	247	127	116	222	262
	Perkembangan (%)	-	-48.58	-8.66	91.38	18.02

Sumber : Kantor BPS. Kabupaten Bantaeng, Diolah Kembali Tahun 2009

Berdasarkan data pada tabel 1 (satu) tersebut di atas, dapat dikatakan dari sisi produksi rata-rata mengalami peningkatan dari tahun 2003 hingga tahun 2007. Dari sisi perkembangan tanaman bahan makanan di Kabupaten Bantaeng rata-rata juga mengalami fluktuasi. Hanya terdapat satu jenis komoditi tanaman bahan makanan Kabupaten Bantaeng yang tidak mengalami fluktuasi baik dari segi produksi dan perkembangan yaitu komoditi kacang tanah.

Berdasarkan penjelasan tabel tersebut di atas mengindikasikan bahwa di Kabupaten Bantaeng masyarakatnya selain membudidayakan tanaman padi, jagung kuning, ubi kayu, ubi kalar, kacang kedele dan kacang hijau juga membudidayakan kacang tanah yang jumlah produksinya setiap tahun mengalami peningkatan. Akan tetapi walaupun kacang tanah yang terus mengalami peningkatan produksi, tetapi kalau

dilihat dari kuantitas jumlah produksi komoditas jagung kuning yang paling terbesar jumlah produksinya di Kabupaten Bantaeng.

Sedangkan untuk skop Provinsi Sulawesi Selatan produksi tanaman bahan makanan pada tahun 2003 hingga tahun 2007 yang paling terbesar jumlah produksinya yaitu jenis komoditi tanaman bahan makanan (padi), selanjutnya jenis komoditi yang paling terendah jumlah produksinya yaitu jenis tanaman kacang kedelai dan untuk mengetahui perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2. **PERKEMBANGAN VOLUME PRODUKSI TANAMAN BAHAN MAKANAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2003-2007 (Ton)**

No	Jenis Tanaman	Tahun				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	Padi (Ton)	3.761.980	3.229.910	3.390.400	3.365.510	3.635.140
	Perkembangan (%)	-	-14.14	4.97	-0.73	8.01
2	Jagung Kuning (Ton)	2.357.599	2.679.250	3.090.550	2.090.080	3.201.960
	Perkembangan (%)	-	13,64	15,35	-32,37	53,20
3	Ubi Kayu (Ton)	514.120	500.270	464.440	567.750	514.280
	Perkembangan (%)	-	-2.69	-7.16	22.24	-9.42
4	Ubi Jalar (Ton)	55.680	57.880	53.510	54.300	58.820
	Perkembangan (%)	-	3.95	-7.55	1.48	8.32
5	Kacang Tanah (Ton)	52.100	40.130	39.090	41.760	39.740
	Perkembangan (%)	-	-22.98	-2.59	6.83	-4.84
6	Kacang Kedele (Ton)	24.070	25.940	27.190	22.240	18.970
	Perkembangan (%)	-	7.77	4.82	-18.21	-14.70
7	Kacang Hijau (Ton)	36.770	25.870	28.940	28.550	32.810
	Perkembangan (%)	-	-29.64	11.87	-1.35	14.92

Sumber : Kantor BPS. Provinsi Sulawesi Selatan, Diolah Kembali Tahun 2009

Kalau di analisa data perkembangan volume produksi tanaman bahan makanan di provinsi sulawesi selatan, maka dapat dikatakan produksi tanaman bahan makanan (padi) merupakan tanaman hasil sektor pertanian yang masih menjadi primadona untuk di provinsi ini, kemudian diikuti oleh jenis tanaman komoditi jagung kuning, dan

selanjutnya diikuti oleh jenis tanaman komoditi ubi kayu, selanjutnya ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau dan selanjutnya tanaman kacang kedele.

4.2. Perkembangan Luas Lahan Tanaman Jagung Kuning di Kabupaten Bantaeng

Dalam ilmu ekonomi pertanian luas lahan merupakan salah satu variabel yang sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan volume produksi terlebih lagi jika sistem pertanian tersebut menerapkan cara ekstensifikasi dalam berladang atau berkebun. Oleh karena itu, sehubungan dengan pertanian tanaman jagung kuning, maka berdasarkan informasi langsung yang penulis dapatkan bahwa di Kabupaten Bantaeng rata-rata masyarakat dalam menanam membudidayakan jagung kuning menerapkan sistem ekstensifikasi di dalam mengelola lahan perkebunan jagung mereka

Perkembangan pembudidayaan jagung kuning di Kabupaten Bantaeng pada dasarnya telah lama digeluti oleh sebagian masyarakat di kabupaten tersebut. Hanya saja pada waktu itu hasil produksi mereka hanya sebatas untuk dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Bantaeng.

Pada tahun 2003 sesuai dalam renstra Pemerintah Kabupaten Bantaeng, pembudidayaan jagung kuning semakin digalakkan oleh masyarakat melalui arahan langsung dari Dinas Pertanian dan tanaman pangan Kabupaten Bantaeng. Alasan mendasar digalakkannya pembudidayaan tanaman ini, karena berdasarkan data dan informasi yang penulis dapatkan komoditas jagung kuning merupakan komoditas ekspor yang tentunya permintaan akan jenis komoditi ini dipasar luar negeri sangat tinggi sehingga dengan keberadaan informasi tersebut, maka masyarakat sangat antusias untuk membudidayakannya. Disatu sisi semakin dikembangkannya jenis

tanaman ini karena didukung pula oleh intruksi Gubernur Sulawesi Selatan melalui pencaangan Provinsi Sulawesi Selatan akan menjadi provinsi yang terbesar di wilayah Timur Indonesia dalam memproduksi jagung kuning dan pengeksport terbesar, hal ini dikatakan oleh Gubernur Syahrul Yasin Limpo pada Rapat pimpinan (RAPIM) para bupati dan walikota se Sulawesi Selatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka di Kabupaten Bantaeng pembudidayaan tanaman jagung kuning semakin digalakkan oleh masyarakat hal itu terbukti dengan jumlah luas lahan tanaman jagung kuning khususnya pada tahun 2007 mengalami peningkatan menjadi seluas 39.145 Ha. Untuk mengetahui lebih jelas luas tanaman jagung dari tahun 2003 hingga tahun 2007, maka dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3. PERKEMBANGAN LUAS LAHAN TANAMAN JAGUNG KUNING DI KABUPATEN BANTANG TAHUN 2003-2007

Tahun	Luas Lahan (Ha)	Perkembangan (%)
2003	37.582	-
2004	37.582	1,35
2005	37.371	-1,89
2006	36.178	-3,19
2007	39.145	8,20
Rata-rata		1,12

Sumber : Kantor Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Bantaeng, Data Diolah Kembali Tahun 2009

Berdasarkan data tabel tersebut di atas, nampak pada tahun 2003 luas lahan tanaman jagung kuning di Kabupaten Bantaeng 37.582 Ha dan pada tahun 2004 meningkat menjadi seluas 37.582 Ha, atau dengan tingkat perkembangan sebesar 1,35 %. Pada tahun 2005 jumlah luas lahan tanaman jagung kuning di Kabupaten Bantaeng mengalami penurunan luas lahan dari 37.582 Ha menjadi 37.371 Ha, atau

mengalami penurunan seluas 211 Ha, serta penurunan perkembangan sebesar -1,89 %. Pada tahun 2006 luas lahan tanaman jagung kuning di Kabupaten Bantaeng menurun lagi menjadi seluas menjadi 36.178 Ha, atau menurun seluas sebesar 1.193 Ha serta perkembangannya menurun sebesar -3,19 %. Selanjutnya pada tahun 2007 luas lahan tanaman jagung kuning di Kabupaten Bantaeng mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu menjadi seluas 39.145 Ha atau dengan tingkat perkembangannya sebesar 8,20 %, sedangkan rata-rata kenaikan luas lahan tanaman jagung kuning selama lima tahun penelitian yaitu sebesar 1,12 % per-tahun.

Kalau dianalisa data pada tabel tersebut di atas, maka dapat dikatakan luas lahan tanaman jagung kuning di Kabupaten Bantaeng mengalami fluktuasi kenaikan baik pada luas lahannya maupun tingkat perkembangannya. Adanya penurunan luas lahan, secara otomatis sangat mempengaruhi volume produksi tanaman jagung kuning. Oleh karena itu, berdasarkan data dan informasi yang penulis dapatkan dari Dinas Tanaman Pangan adanya penurunan luas lahan disebabkan oleh 2 (dua) faktor yang pertama disebabkan dengan adanya pembangunan berbagai prasarana seperti jalan raya dan pembangunan perumahan baik perumahan penduduk maupun pembangunan perumahan BTN, sedangkan yang kedua disebabkan adanya pengalihan fungsi lahan dari tanaman jagung berubah menjadi tanaman padi. Akan tetapi pada tahun 2007 luas tanaman jagung mengalami kembali peningkatan.

Dengan melihat kondisi keberadaan luas lahan tanaman jagung kuning, maka seharusnya Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam hal ini instansi Dinas Tanaman Pangan perlunya mengambil langka-langka kebijakan yang lebih prefentif, karena

tanaman jagung mempunyai nilai ekonomis yang relatif sangat tinggi di mana apabila masyarakat spesialisasi pada jenis tanaman perkebunan ini, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya akan mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat petani budidaya tanaman jagung kuning disatu sisi serta disisi lain mampu meningkatkan pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dari aspek penerimaan retribusi dan pajak baik retribusi dari tanaman perkebunan jagung kuning dan pajak perdagangan dan pajak pertambahan hasil (PPH).

4.3. Perkembangan Volume Produksi Tanaman Jagung Kuning di Kabupaten Bantaeng

Dalam peningkatan volume produksi, maka dalam teori ekonomi pertanian dipengaruhi oleh beberapa variabel penentu yaitu meliputi luas lahan, bibit, tenaga kerja, pupuk, obat (racun hama), mesin dan lain-lain yang hubungannya dalam peningkatan produksi.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, maka tanaman perkebunan jagung kuning yang dibudidayakan oleh masyarakat Kabupaten Bantaeng berdasarkan hasil survei langsung penulis, rata-rata para petani lebih mengandalkan 4 (empat) faktor produksi yaitu luas lahan, tenaga kerja, mesin pengolahan tanah dan racun hama. Dengan kondisi ini para petani untuk memperoleh faktor produksi tersebut tidak sukar, karena luas lahan yang dibutuhkan petani ada sebagian milik petani sendiri dan ada juga yang disewa serta ada pula tanah milik pemerintah yang sengaja dipinjamkan oleh petani untuk dikelola dalam pembudidayaan jagung kuning. Sedangkan untuk mesin pengolah tanah pertanian petani adakalanya mengelolah dengan menggunakan cangkul dengan memanfaatkan beberapa tenaga kerja dan adapula yang menggunakan

mesin pengolahan tanah yang sengaja disewa oleh petani. Untuk obat-obatan seperti racun rumput dan pembunuh hamah petani tidak terlalu sulit untuk memperolehnya karena dapat dibeli di Koperasi unit desa terdekat, serta untuk tenaga kerja rata-rata petani menggunakan sanak keluarga seperti anak, kamanakan serta famili mereka sendiri. Penggunaan tenaga kerja ini digunakan mulai dari pengolahan sawah, penaburan bibit, perawatan tanaman hingga pada panen serta pasca panen tenaga kerja digunakan.

Berdasarkan penjelasan penggunaan faktor produksi pembudidayaan jagung kuning di Kabupaten Bantaeng tersebut di atas, maka jumlah volume produksi jagung kuning di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2003 sebesar 205.384 ton dan pada tahun 2007 meningkat menjadi sebesar 297.525 ton. Untuk mengetahui lebih jelas perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4. **PERKEMBANGAN VOLUME PRODUKSI TANAMAN JAGUNG KUNING DI KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2003-2007**

Tahun	Volume Produksi (Ton)	Perkembangan (%)
2003	205.384	-
2004	208.510	1,52
2005	220.260	5,64
2006	186.561	-15,30
2007	297.525	51,36
Rata-rata		10,81

Sumber : Kantor Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Bantaeng, Diolah tahun 2009

Berdasarkan data pada tabel 3 (tiga) tersebut di atas, menunjukkan jumlah volume produksi tanaman jagung di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2003 sebesar 205.384 ton dan pada tahun 2004 meningkat menjadi sebesar 208.510 ton atau mengalami peningkatan sebesar 126 ton dengan perkembangan sebesar 1,52 %.

Selanjutnya pada tahun 2005 volume produksi tanaman jagung di Kabupaten Bantaeng meningkat menjadi sebesar 220.260 ton atau kenaikannya sebesar 14.876 ton dengan tingkat perkembangan sebesar 5,64 %. Akan tetapi pada tahun 2006 jumlah volume produksi mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu dari 220.260 ton menjadi 186.561 ton atau penurunannya yaitu sebesar 33.699 ton atau penurunan perkembangan sebesar -15,30 %. Sedangkan pada tahun 2007 jumlah volume produksi meningkat menjadi 297.525 ton atau kenaikannya sebesar 110.964 ton serta rata-rata kenaikan perkembangannya selama lima tahun yaitu sebesar 10,81 ton per-tahun.

Kalau di analisa data tabel tersebut di atas, menunjukkan volume produksi juga mengalami fluktuasi, dan penurunan volume produksi terjadi pada tahun 2006 dan hal itu sangat besar nilai penurunannya yaitu sebesar 33.699 ton. Adanya penurunan produksi jagung kuning di Kabupaten bantaeng berdasarkan data dan informasi langsung dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan hal itu disebabkan oleh luas lahan pada tahun yang sama banyak mengalami perubahan fungsi pemanfaatan di mana masyarakat banyak menggunakan lahan jagung mereka dan diganti untuk menanam tanaman padi dan disamping itu pula banyak masyarakat petani jagung belum mengetahui kepastian tingkat harga dan proses pemasaran jagung kuning yang mereka produksi. Akan tetapi pada tahun 2007 volume produksi meningkat kembali menjadi 297.525 ton dan hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Bantaeng dapat dikatakan kabupaten yang memproduksi jagung kuning terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan.

4.4. Perkembangan Nilai Produksi Tanaman Jagung Kuning di Kabupaten Bantaeng

Adanya dorongan atau animo bagi para produsen khususnya petani untuk meningkatkan produksi hasil pertaniannya pada dasarnya menurut teori ekonomi mikro disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor harga dan faktor pemasaran produk. Dari kedua faktor tersebut pada dasarnya sudah menyatu (*include*) karena adanya harga yang relatif tinggi tentunya diikuti oleh pemasaran yang prospektif.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka hubungannya dengan masyarakat petani budidaya jagung kuning di Kabupaten Bantaeng secara kontinyu terus membudidayakan jenis tanaman ini karena didorong adanya pemasaran produk yang pasti ke Surabaya dan harga yang relatif tinggi dan disisi lain pemerintah setempat atau Dinas Pertanian dan tanaman pangan sereta organisasi terkait seperti kamar dagang dan industri (KADIN) Kabupaten Bantaeng juga tidak hentinya selalu memberikan perhatian khusus dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan usaha manajemen pertanian serta membantu para petani dalam memasarkan produk jagung kuning.

Dengan dasar inilah mengapa para petani jagung kuning di Kabupaten Bantaeng sangat antusias untuk terus membudidayakan jenis tanaman ini hingga tahun 2009 di mana produksi terus mengalami peningkatan dan demikian pula harga dari komoditi jagung kuning. Dimana pada tahun 2003 harga jagung kuning sebesar Rp. 3.000 per kg dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 4.500 per kg, dan untuk mengetahui lebih jelas kenaikannya dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini yaitu :

Tabel 4.5. PERKEMBANGAN HARGA JAGUNG KUNING PER KILO GRAM DI KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2003 – 2007

Tahun	Harga (Rp/Kg)	Perkembangan (%)
2003	3.000	-
2004	3.500	16.67
2005	4.000	14.29
2006	4.000	0.00
2007	4.500	12.50
Rata-rata		10,86

Sumber : Kantor Kadin Kabupaten Bantaeng, Diolah Kembali tahun 2009

Berdasarkan data tabel 4 (empat) tersebut di atas, harga jagung kuning di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2003 nilainya yaitu Rp. 3.000 per-kg dan pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp 3.500 per-kg atau meningkat sebesar Rp. 500 dengan perkembangan sebesar 16,67 %. Selanjutnya pada tahun 2005 harga jagung kuning di Kabupaten Bantaeng meningkat lagi menjadi Rp. 4.000 per-kg atau tingkat perkembangannya sebesar 14,29 %, sedangkan pada tahun 2006 harga jagung kuning tidak mengalami kenaikan dan selanjutnya pada tahun 2007 harga jagung kuning meningkat menjadi Rp. 4.500 per-kg atau dengan tingkat perkembangan sebesar 12,50 % serta rata-rata kenaikan perkembangannya selama lima tahun yaitu 10,86 % per-tahun.

Kalau dianalisa data tabel harga jagung kuning tersebut di atas, maka dapat dikatakan harga jagung kuning sebagai komoditi ekspor masih relative sangat rendah jika dibandingkan dengan tingkat kenaikan harga-harga barang lainnya. Akan tetapi berdasarkan data dan informasi yang penulis dapatkan harga tersebut merupakan harga patokan dari penada atau distributor pemasaran yang terdapat di Kota Makaassar.

Berdasarkan harga jagung tersebut di atas seharusnya dinas terkait perlu menjaga kestabilan harga atau merasionalkan antara harga jagung kuning dengan biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh para petani jagung kuning. Perlunya dilakukan rasionalisasi harga oleh dinas terkait, tujuannya yaitu agar para petani budidaya jagung kuning lebih termotivasi dan lebih produktif dalam meningkatkan volume produksinya.

4.5. Nilai Tambah (Value Added) Produksi Tanaman Jagung Kuning di Kabupaten Bantaeng

Untuk melihat apakah kegiatan salah satu sektor ekonomi memberikan sumbangan atau kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, maka terlebih dahulu yang harus dilihat yaitu nilai tambah (value added) dari sektor ekonomi tersebut.

Oleh karena itu, maka untuk melihat berapa besar kontribusi sub sektor pertanian dalam hal ini sub sektor perkebunan jagung kuning maka terlebih dahulu harus diketahui berapa besar nilai tambah dari kegiatan produksinya.

Dalam menganalisis nilai tambah menurut beberapa pakar ekonomi salah satunya yaitu Robinson Tarigan mengatakan dalam bukunya *Ekonomi Regional* (2005 : 16), mengatakan untuk menganalisis nilai tambah maka yang masuk dalam perhitungan tersebut yaitu biaya langsung produksi yang meliputi pembelian bibit, pupuk, dan pembelian pestisida.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka analisis nilai tambah (value added) proses perhitungannya dapat dilihat pada lampiran skripsi ini sedangkan hasilnya yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.6. PERKEMBANGAN NILAI TAMBAH TANAMAN JAGUNG KUNING DI KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2003-2007

Tahun	Nilai Tambah (Rp)	Perkembangan (%)
2003	97.515,80	-
2004	106.897,50	9,62
2005	117.498,75	9,92
2006	111.525,25	-5,08
2007	132.761,94	19,04
Rata-rata		8,37

Sumber : Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Bantaeng, Diolah Kembali 2009

Berdasarkan data tabel 5 (lima) tersebut di atas, menunjukkan nilai tambah produksi tanaman jagung kuning di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2003 senilai Rp. 97.515,80 dan pada tahun 2004 meningkat menjadi sebesar Rp. 106.897,50 atau dengan tingkat perkembangan sebesar 9,62 %. Selanjutnya pada tahun 2005 meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 117.498,75 atau tingkat perkembangannya sebesar 9,92 %. Pada tahun 2006 nilai tambah produksi menurun menjadi sebesar Rp. 111.525,25 atau tingkat perkembangannya menurun menjadi -5,08 %. Sedangkan pada tahun 2007 nilai tambah produksi jagung kuning di Kabupaten Bantaeng meningkat drastis yaitu sebesar Rp. 132.761,94 atau tingkat perkembangannya sebesar 19,04 % serta rata-rata tingkat perkembangannya selama lima tahun yaitu sebesar 8,37 % per-tahun.

Kalau dianalisa penjelasan data tersebut di atas, maka dapat dikatakan di Kabupaten Bantaeng nilai tambah produksi yang hubungannya terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten ini memberikan kontribusi yang relatif besar dan oleh karena itu, perlunya pemerintah terkait lebih mengoptimalkan perkembangan produksi jagung kuning.

4.6. Analisis Location Quotion (LQ) Tanaman Jagung Kuning

Tujuan dianalisis tanaman jagung kuning yang dihasilkan oleh Kabupaten Bantaeng kemudian dibandingkan dengan jumlah produksi tanaman jagung di Provinsi Sulawesi selatan sebagai pembanding dengan menggunakan alat analisis Location Quotion (LQ), yaitu untuk mengetahui apakah tanaman komoditi jagung kuning di Kabupaten Bantaeng merupakan jenis komoditi sektor unggulan atau tidak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sebelum penulis mengkaji lebih mendalam tentang analisis ini, terlebih dahulu akan dijelaskan dasar teori dari teori basis ekonomi. Dalam analisis ini, logika dasar LQ adalah teori basis ekonomi yang intinya adalah apabila salah satu sector ekonomi sebagai sektor basis menghasilkan barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Selanjutnya, adanya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi (*consumtion*, C) dan investasi (*Investment*, I) di daerah tersebut. Hal tersebut selanjutnya akan menaikkan pendapatan dan meningkatkan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan terhadap sektor basis, tetapi juga menaikkan permintaan akan sektor non basis (lokal). Kenaikan permintaan ini akan mendorong kenaikan investasi pada sektor yang bersangkutan dan juga kepada sector yang lain (non basis). Dengan alasan tersebut, maka sektor basis harus dikembangkan terlebih dahulu.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dalam analisis Location Quotion (LQ) penulis menggunakan data pada tabel 4.1 halaman 36 dan tabel 4.2 halaman 37

yang proses analisisnya lihat lampiran 1 (satu) sedangkan hasil analisisnya yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.7. HASIL ANALISIS LOCATION QUOTION (LQ) TANAMAN BAHAN MAKANAN KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2003-200

Jenis Tanaman	Tahun					Jumlah	Rata-rata
	2003	2004	2005	2006	2007		
Padi (ton)	0.46	0.53	0.53	0.48	0.39	2.39	0.48
Jagung Kuning (Ton)	2.08	1.74	1.66	2.10	1.84	9.43	1.89
Ubi Kayu (Ton)	0.23	0.22	0.20	0.15	0.14	0.94	0.19
Ubi Jalar (Ton)	0.33	0.29	0.33	0.47	0.39	1.81	0.36
Kacang Tanah (Ton)	0.33	0.84	0.92	1.09	1.05	4.22	0.84
Kacang Kedele (Ton)	0.75	0.67	0.29	0.87	0.92	3.49	0.70
Kacang Hijau (Ton)	0.16	0.11	0.09	0.18	0.16	0.70	0.14
Padi (ton)	0.46	0.53	0.53	0.48	0.39	2.39	0.48

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2009

Berdasarkan hasil analisis location quotion tanaman bahan makanan tersebut di atas, menunjukkan di Kabupaten bantaeng hanya tanaman komoditi jagung kuning yang mempunyai nilai LQ lebih dari satu sedangkan jenis komoditi tanaman lainnya tidak memiliki nilai lebih dari satu.

Karena hanya komoditi tanaman jagung kuning yang memiliki nilai LQ lebih besar dari satu yaitu 1,89 maka artinya adalah $(0,89/1,89)$ hasilnya yaitu 47,09 % secara teoritis hasil perdagangannya dapat diekspor sedangkan sisanya sebesar 52,91 % dapat dikonsumsi sendiri oleh masyarakat daerah bersangkutan (Kabupaten Bantaeng).

Dari hasil analisis ini pula maka dapat dikatakan di Kabupaten Bantaeng komoditas jagung kuning merupakan komoditas unggulan yang mampu memberikan

kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan PDRB, maka dengan ini terjawablah hipotesis yang penulis ajukan sebelumnya

4.7. Perkembangan PDRB Kabupaten Bantaeng Atas Harga Konstan

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah, maka indikatornya adalah berapa besar GNP atau GDP apabila suatu Negara dan PDRB apabila yang dilihat suatu wilayah regional provinsi atau kabupaten/kota.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu kabupaten diwilayah Provinsi Sulawesi Selatan berupaya agar selalu laju pertumbuhan ekonominya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keinginan Pemerintah Kabupaten Bantaeng, maka kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut pemerintah ini berupaya mendorong sektor-sektor ekonominya lebih produktif.

Sektor-sektor ekonomi yang dimasud terdiri dari 9 (Sembilan) sektor ekonomi yang meliputi sector pertanian, pertambangan, industry, Listrik gas dan air bersih, bangunan, Perdagangan, Hotel dan restoran, pengangkutan dan kominikasi, Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa lainnya.

Dari ke Sembilan sektor ekonomi tersebut di atas, yang penulis akan menyajikan dan menjelaskan hanya pada Produk domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan dengan tahun dasar 2003. Adapun penggunaan PDRB berdasarkan harga konstan karena tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi bukan untuk mengetahui laju tingkat inflasi sehingga data PDRB yang digunakan bukan berdasarkan harga berlaku.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka untuk mengetahui berapa besar nilai PDRB berdasarkan harga konstan Kabupaten Bantaeng dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2003-2007

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	Pertanian	312.518,56	318.703,77	325.770,34	333.976,97	346.914,04
	Perkembangan (%)	-	1,98	2,22	2,52	3,87
2	Pertambangan	2.802,04	3.028,39	3.330,22	3.741,82	3.871,98
	Perkembangan (%)	-	8,08	9,97	12,36	3,48
3	Industri	17.233,55	18.445,88	19.413,74	20.092,91	20.807,51
	Perkembangan (%)	-	7,03	5,25	3,50	3,56
4	Listrik, Gas & air Bersih	2.655,63	2.782,70	2.898,96	3.110,96	3.360,44
	Perkembangan (%)	-	4,78	4,18	7,31	8,02
5	Bangunan	23.493,48	25.076,53	27.380,06	31.238,24	33.982,26
	Perkembangan (%)	-	6,74	9,19	14,09	8,78
6	Perdag, Hotel & Restoran	51.876,96	53.189,78	58.906,07	61.920,72	65.307,58
	Perkembangan (%)	-	2,53	10,75	5,12	5,47
7	Pengangkutan & Komunikasi	11.179,07	12.016,69	13.005,64	14.715,91	16.420,04
	Perkembangan (%)	-	7,49	8,23	13,15	11,58
8	Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan	25.299,33	29.658,93	30.809,90	32.578,91	35.361,96
	Perkembangan (%)	-	17,23	3,88	5,74	8,54
9	Jasa-Jasa Lainnya	53.388,79	58.677,38	62.756,06	70.638,89	75.391,80
	Perkembangan (%)	-	9,91	6,95	12,56	6,73
	PDRB	500.447,39	521.579,04	544.270,90	572.015,32	601.417,59
	Perkembangan (%)	-	4,22	4,35	5,10	5,14

Sumber : Kantor BPS. Kabupaten Bantaeng. Diolah Kembali 2009

Berdasarkan data tabel tersebut di atas, nampak pada tahun 2003-2004 perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian Kabupaten Bantaeng sebesar 1,98 % dan pada tahun 2004-2005 perkembangan PDRB sektor pertanian meningkat menjadi sebesar 2,22 % sedangkan pada tahun 2005-2006

meningkat menjadi 2,52 % dan selanjutnya pada tahun 2006-2007 meningkat perkembangannya menjadi 3,87 %, serta perkembangan rata-rata selama lima tahun yaitu sebesar 2,65 % per-tahun.

Untuk sektor pertambangan dari tahun 2003 hingga tahun 2006 mengalami terus peningkatan sedangkan pada tahun 2007 sektor pertambangan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bantaeng menurun menjadi 3,48 %, sedangkan rata-rata tingkat perkembangan selama lima tahun yaitu sebesar 8,47 % per tahun. Selanjutnya untuk sektor industri nilai perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Bantaeng dari tahun 2003 hingga tahun 2007 mengalami fluktuasi kenaikan sedangkan rata-rata tingkat perkembangannya selama lima tahun yaitu sebesar 4,84 % per-tahun.

Selanjutnya untuk sektor Listrik, Gas & air Bersih nilai perkembangan produk domestik regional bruto dari tahun 2003 hingga tahun 2007 di Kabupaten Bantaeng juga mengalami fluktuasi perkembangan dan rata-rata perkembangannya selama lima tahun sebesar 6,07 % per-tahun. Sedangkan untuk sektor Bangunan perkembangan nilai PDRB-nya dari tahun 2003 hingga tahun 2007 juga mengalami fluktuasi kenaikan perkembangan serta rata-rata perkembangannya selama lima tahun yaitu sebesar 9,63 % per-tahun.

Sedangkan untuk sektor Perdagangan, Hotel & Restoran di Kabupaten Bantaeng nilai perkembangan PDRB-nya dari tahun 2003 hingga tahun 2007 mengalami pula fluktuasi kenaikan serta rata-rata kenaikannya selama lima tahun yaitu sebesar 5,97 % per-tahun. Selanjutnya untuk sektor Pengangkutan & Komunikasi di

Kabupaten Bantaeng nilai perkembangan PDRB-nya dari tahun 2003 hingga tahun 2007 juga mengalami fluktuasi kenaikan sedangkan rata-rata perkembangan kenaikannya selama lima tahun yaitu sebesar 10,11 % per-tahun.

Selanjutnya nilai produk domestik regional bruto (PDRB) sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan di Kabupaten Bantaeng nilai perkembangannya dari tahun 2003 hingga tahun 2007 juga secara nyata mengalami fluktuasi perkembangan serta rata-rata perkembangannya selama lima tahun yaitu sebesar 8,85 % per-tahun sedangkan untuk nilai produk domestik regional bruto (PDRB) sektor jasa-jasa lainnya di Kabupaten Bantaeng nilai perkembangannya dari tahun 2003 hingga tahun 2007 secara nyata pula mengalami fluktuasi perkembangan serta rata-rata perkembangannya selama lima tahun yaitu sebesar 9,04 % per-tahun.

Kalau dianalisa secara keseluruhan nilai perkembangan PDRB 9 (Sembilan) sektor ekonomi yang terdapat di Kabupaten Bantaeng rata-rata mengalami fluktuasi perkembangan, hanya sektor pertanian yang grafik perkembangannya setiap tahun mengalami terus peningkatan dari tahun 2003 hingga tahun 2007. Demikian pula halnya untuk jumlah total nilai PDRB Kabupaten Bantaeng di mana nilainya pada tahun 2003 sebesar Rp. 500,447.39 dan pada tahun 2004 meningkat menjadi sebesar Rp. 521,579.04 atau dengan tingkat perkembangan sebesar 4.22 % per-tahun. Selanjutnya pada tahun 2005 nilai total produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Bantaeng meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 544,270.90 atau dengan tingkat perkembangan sebesar 4.35 %. Pada tahun 2006 nilai total PDRB Kabupaten Bantaeng meningkat lagi menjadi sebesar Rp.572,015.32 dengan tingkat perkembangan

sebesar 5.10 %. Sedangkan pada tahun 2007 nilai total produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Bantaeng meningkat menjadi Rp. 601,417.59 dan tingkat perkembangannya sebesar 5,14 %, serta rata-rata kenaikannya selama lima tahun yaitu sebesar 4,70 % per-tahun.

Didapatnya nilai rata-rata perkembangan PDRB Kabupaten Bantaeng hanya sebesar 4,70 % per-tahun, pada dasarnya menurut teori ekonomi makro khususnya pada pendekatan pertumbuhan ekonomi, maka dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantaeng masih relatif rendah karena berada dibawah 5 % per-tahun sebagaimana standar pertumbuhan ekonomi yang layak menurut teori pertumbuhan Harord Dhomar yang inti teorinya mengatakan suatu daerah atau negara dikatakan mengalami kemajuan pembangunan ekonominya jika hanya jika rata-rata pertumbuhan ekonominya di atas 5 % per-tahun yang disumbangkan dari nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu.

Kalau kita merujuk pada dasar teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh pakar pertumbuhan ekonomi Harord Dhomar maka Kabupaten Bantaeng kemajuan pembangunan ekonominya masih relatif rendah, akan tetapi walaupun demikian nilai perkembangan ekonomi kabupaten ini memperlihatkan grafik yang meningkat setiap tahunnya.

4.8. Analisis Kontribusi Tanaman Jagung Kuning Terhadap PDRB Kabupaten Bantaeng

Sebelum penulis mengkaji lebih mendalam tentang sumbangan atau kontribusi nilai komoditas tanaman jagung kuning terhadap produk domestik regional bruto

(PDRB) Kabupaten Bantaeng, maka terlebih dahulu menjelaskan variabel-variabel yang akan digunakan dalam pembahasan analisis ini.

Dalam penganalisaan ini, penulis terlebih dahulu menghitung nilai tambah dari komoditas jagung kuning yang proses analisisnya dapat dilihat pada lampiran skripsi ini dan hasil analisisnya sebagaimana yang terdapat pada data tabel 4.6, sedangkan sebagai variabel pembanding penulis menggunakan data total PDRB pada tabel 4.7. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapatlah diketahui kontribusi nilai komoditas jagung kuning di Kabupaten Bantaeng dengan berdasarkan persamaan rumus yaitu :

$$S_j = \frac{Y_j}{Y} \times 100 \%$$

Maka kontribusi komoditas jagung kuning terhadap PDRB di Kabupaten Bantaeng yaitu :

- Untuk tahun 2003 sebesar $S_j = \frac{97.515,80}{500.447,39} \times 100 \%$

$$S_j = \underline{19,49 \%}$$

- Untuk tahun 2004 sebesar $S_j = \frac{106.897,50}{521.579,04} \times 100 \%$

$$S_j = \underline{20,49 \%}$$

- Untuk tahun 2005 sebesar $S_j = \frac{117.498,75}{544.270,90} \times 100 \%$

$$S_j = \underline{21,59 \%}$$

- Untuk tahun 2006 sebesar $S_j = \frac{111.525,25}{572.015,32} \times 100 \%$

$$S_j = \underline{19,50 \%}$$

- Untuk tahun 2007 sebesar $S_j = \frac{132.761,94}{601.417,59} \times 100 \%$

$$S_j = \underline{22,07 \%}$$

Dari hasil analisis kontribusi nilai komoditas jagung kuning terhadap PDRB Kabupaten Bantaeng tersebut di atas, maka dapat dikatakan secara nyata kontribusi komoditas jagung kuning relatif besar dan rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 20,63 % per-tahun, selebihnya 79,37 % disumbangkan oleh sektor lain yang terdapat pada PDRB di Kabupaten Bantaeng.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab pembahasan hasil penelitian, maka kesimpulan yang penulis tarik yaitu :

1. Komoditas tanaman jagung kuning di Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu jenis komoditas unggulan yang dikembangkan tingkat produksinya dan hal ini terbukti pada tahun 2003 jumlah produksi sebesar 205.384 ton sedangkan pada tahun 2007 meningkat sebesar 297.525 ton dengan rata-rata tingkat perkembangan produksi selama lima tahun sebesar 10,81 % per-tahun.
2. Dari hasil analisis *location Quotion* (LQ) diperoleh hasil rata-rata selama kurun waktu penelitian 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2003 hingga tahun 2007 yaitu sebesar 1,89 ton per-tahun perbandingan produksi antara Kabupaten Bantaeng dengan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pembanding, dan hal ini artinya 47,09 % dapat diekspor keluar daerah dan selebihnya 52,91 % dapat dikonsumsi sendiri oleh masyarakat Kabupaten Bantaeng.
3. Dari hasil analisis kontribusi nilai tambah komoditas jagung kuning terhadap PDRB Kabupaten Bantaeng pada tahun 2003 sebesar 19,49 % dan pada tahun 2007 sebesar 22,07 % dengan rata-rata kontribusi per tahun selama lima tahun yaitu 20,63 % per-tahun dan selebihnya sebesar 79,37 % disumbangkan oleh sektor ekonomi lainnya yang terdapat di Kabupaten Bantaeng. Sedangkan pertumbuhan ekonominya selama lima tahun rata-rata sebesar 4,70 % per-tahun.

5.2. S a r a n

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang penulis ajukan yaitu :

1. Agar produksi komoditas jagung kuning lebih besar peningkatannya pada tahun akan datang, maka sebaiknya pemerintah Kabupaten Bantaeng tidak memanfaatkan lahan-lahan produktif budidaya tanaman jagung kuning dijadikan lahan pembangunan prasarana transportasi dan pembangunan perumahan perumahan serta pembangunan fasilitas lainnya.
2. Agar produksi komoditas tanaman jagung kuning lebih besar peningkatannya pada tahun-tahun akan datang, maka sebaiknya Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta lembaga-lembaga ekonomi lainnya seperti KADIN, Koperasi dan Lembaga Keuangan lainnya dapat membantu para petani budidaya tanaman jagung kuning baik dari aspek pemasaran maupun dari aspek bantuan modal usaha.
3. Agar produksi komoditas tanaman jagung kuning lebih besar peningkatannya pada tahun-tahun akan datang, maka sebaiknya para petani dan dinas terkait di Kabupaten Bantaeng memperhatikan sistem manajemen usaha tani melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan, yang tujuannya agar petani jagung kuning tau dan mengerti bagaimana mengelolah agrobisnis mereka sehingga profit yang diharapkan dapat lebih maksimum dan pada akhirnya mampu mendorong produktivitas petani jagung kuning dalam menghasilkan produksi yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad Lncolin, 1999. **Ekonomi Pembangunan**, Penerbit : BPFE, Yogyakarta.
- A. Jaka Wasana, 1999. **Ekonomi I**, Penerbit : Erlangga, Jakarta.
- Dumairy, 1997. **Perekonomian Indonesia**, Penerbit : Erlangga, Jakarta.
- M. Suparmako dan Irawan, 1992. **Ekonomi Pembangunan**, Penerbit : BPFE, Yogyakarta.
- Murni Asfia, 2006. **Ekonomi Makro**, Penerbit : Refika Aditama, Bandung.
- Sudarman Ari, 2001. **Pengantar Ekonomi Mikro**, Penerbit : Erlangga, Jakarta.
- Subandi, 2005. **Sistem Ekonomi Indonesia**, Penerbit : Alfabeta, Bandung.
- Sitohang Paul, 2001. **Pengantar Perencanaan Regional**, Penerbit : FEUI, Jakarta.
- Tjokroamidjojo Bintoro, 2000. **Perencanaan Pembangunan**, Penerbit : PT. Gunung Agung, Jakarta.
- T. H. Tambunan Tulus, 2001. **Perekonomian Indonesia : Beberapa Isu Penting**, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Widodo Tri, 2006. **Perencanaan Pembangunan**, Penerbit : UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Winardi, 1998. **Kamus Ekonomi**, Edisi Baru Inggris-Indonesia, Penerbit : Alumni, Bandung.

DI KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2003-2007

	Tahun	Harga Jagung (P)	Jumlah Produksi (Q)	(P x Q)
I	2003	3,000.00	205,384.00	616,152,000.00
	2004	3,500.00	208,510.00	729,785,000.00
	2005	4,000.00	220,260.00	881,040,000.00
	2006	4,000.00	186,561.00	746,244,000.00
	2007	4,500.00	297,525.00	1,338,862,500.00

	Tahun	Bibit	Harga Bibit	Biaya Bibit (Rp.)
II	2003	111,346.00	2,200.00	244,961,200.00
	2004	132,127.50	2,500.00	330,318,750.00
	2005	144,895.00	2,750.00	398,461,250.00
	2006	107,640.25	3,000.00	322,920,750.00
	2007	182,381.25	3,250.00	592,739,062.50

	Tahun	Pupuk Yang Digunakan	Harga Pupuk/Kg.	Biaya Pupuk (Rp.)
III	2003	6,950	3,000.00	20,850,000.00
	2004	7,475	3,250.00	24,293,750.00
	2005	7,925	4,500.00	35,662,500.00
	2006	5,162	4,000.00	20,648,000.00
	2007	12,797	4,500.00	57,586,500.00

	Tahun	Pestisida	Harga Pestisida	Biaya Pestisida (Rp)
IV	2003	3,371	75,000.00	252,825,000.00
	2004	3,577	75,000.00	268,275,000.00
	2005	3,292	100,000.00	329,200,000.00
	2006	3,235	90,000.00	291,150,000.00
	2007	4,825	115,000.00	554,875,000.00

Tahun	P x Q = TR	Jumlah Biaya (II+III+IV)	Nilai Tambah 4 = (2 - 3)	(Rp. Seribu)
1	2	3	4	5
2003	616,152,000.00	518,636,200.00	97,515,800.00	97,515.80
2004	729,785,000.00	622,887,500.00	106,897,500.00	106,897.50
2005	881,040,000.00	763,541,250.00	117,498,750.00	117,498.75
2006	746,244,000.00	634,718,750.00	111,525,250.00	111,525.25
2007	1,338,862,500.00	1,206,100,562.50	132,761,937.50	132,761.94



Tanaman Bahan Makanan Kabupaten Bantaeng

No	Jenis Tanaman	2003	2004	2005	2006	2007
1	Padi (ton)	71,578.00	76,899.00	76,906.00	68,685.00	72,275.00
2	Jagung (Ton)	205,384.00	208,510.00	220,260.00	186,561.00	297,525.00
3	Ubi Kayu (Ton)	4,930.00	5,038.00	3,939.00	3,544.00	3,665.00
4	Ubi Jalar (Ton)	763.00	749.00	764.00	1,098.00	1,152.00
5	Kacang Tanah (Ton)	713.00	1,513.00	1,536.00	1,941.00	2,093.00
6	Kacang Kedele (Ton)	750.00	777.00	337.00	824.00	875.00
7	Kacang Hijau (Ton)	247.00	127.00	116.00	222.00	262.00
	Total	284,365.00	293,613.00	303,858.00	262,875.00	377,847.00

Tanaman Bahan Makanan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Jenis Tanaman	2003	2004	2005	2006	2007
1	Padi (ton)	3,761,980.00	3,229,910.00	3,390,400.00	3,365,510.00	3,635,140.00
2	Jagung (Ton)	2,357,599.00	2,679,250.00	3,090,550.00	2,090,080.00	3,201,960.00
3	Ubi Kayu (Ton)	514,120.00	500,270.00	464,440.00	567,750.00	514,280.00
4	Ubi Jalar (Ton)	55,680.00	57,880.00	53,510.00	54,300.00	58,820.00
5	Kacang Tanah (Ton)	52,100.00	40,130.00	39,090.00	41,760.00	39,740.00
6	Kacang Kedele (Ton)	24,070.00	25,940.00	27,190.00	22,240.00	18,970.00
7	Kacang Hijau (Ton)	36,770.00	25,870.00	28,940.00	28,550.00	32,810.00
	Total	6,802,319.00	6,559,250.00	7,094,120.00	6,170,190.00	7,501,720.00

Hasil Analisis

No	Jenis Tanaman	2003	2004	2005	2006	2007
1	Padi (ton)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
2	Jagung (Ton)	0.09	0.08	0.07	0.09	0.09
3	Ubi Kayu (Ton)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
4	Ubi Jalar (Ton)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
5	Kacang Tanah (Ton)	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
6	Kacang Kedele (Ton)	0.03	0.03	0.01	0.04	0.05
7	Kacang Hijau (Ton)	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01
		0.04	0.04	0.04	0.04	0.05

Indeks Location Quotient Kabupaten Bantaeng

No	Jenis Tanaman	2003	2004	2005	2006	2007	Jumlah	Rata-rata
1	Padi (ton)	0.46	0.53	0.53	0.48	0.39	2.39	0.48
2	Jagung (Ton)	2.08	1.74	1.66	2.10	1.84	9.43	1.89
3	Ubi Kayu (Ton)	0.23	0.22	0.20	0.15	0.14	0.94	0.19
4	Ubi Jalar (Ton)	0.33	0.29	0.33	0.47	0.39	1.81	0.36
5	Kacang Tanah (Ton)	0.33	0.84	0.92	1.09	1.05	4.22	0.84
6	Kacang Kedele (Ton)	0.75	0.67	0.29	0.87	0.92	3.49	0.70
7	Kacang Hijau (Ton)	0.16	0.11	0.09	0.18	0.16	0.70	0.14

